



Daerah Siap Ketatkan Pembatasan

Masyarakat diminta menyikapi dengan bijak kenaikan level PPKM.

■ ARIE LUKIHARDIANTI,
 MUHAMMAD FAUZI RIDWAN

BANDUNG — Pemerintah daerah (pemda) menyatakan siap menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat untuk memperketat pembatasan, dengan menaikkan status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemda menyadari perlunya langkah pengetatan demi menekan kasus Covid-19 yang belakangan kembali meningkat akibat varian omikron.

Di Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan status PPKM menjadi Level 3 untuk wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Bandung Raya. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, kenaikan status tersebut bukan semata akibat tingginya jumlah kasus, melainkan juga rendahnya *tracing* sebagaimana yang disampaikan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengaku sudah meminta semua daerah di Jabar untuk meningkatkan *tracing*. "Satu yang sakit harus dicek sebanyak mungkin kontak eratnya," kata Emil, Senin (7/2).

Menurut Emil, penerapan PPKM

Level 3 kali tidak bisa disamaratakan, untuk semua daerah. Oleh karena itu, ia memerintahkan pemerintah daerah mengadaptasinya seadil mungkin. "Contohnya Sumedang, kasusnya rendah, tapi karena dia berlabel aglomerasi Bandung Raya maka harus ditentukan bagaimana PPKM level tiganya," katanya.

Dengan demikian, menurut Emil, aturan pembatasan antara Sumedang dan Kota Bandung yang kasusnya tinggi, tidak bisa disamakan. Sebagai aturan turunan, pemerintah daerah akan membuat peraturan wali kota atau peraturan bupati sesuai kewenangan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

"Jadi dalam pandangan kami, PPKM Level 3 saat omikron saat ini tidak mungkin diterapkan sama rata seperti saat delta," katanya.

Terkait aktivitas ekonomi masyarakat, Emil menyatakan, aturan pembatasan dibuat sebijak mungkin tanpa mengurangi ekonomi yang sekarang sudah sangat baik di seluruh Jawa Barat. Khusus Kota Bandung, Emil meminta agar pemkot gencar melakukan tes acak di restoran, hotel, dan tempat wisata.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengata-

kan, pengetatan akan dilakukan terkait jam operasional dan kapasitas sektor usaha serta sosial. Sesuai arahan pemerintah pusat dalam rapat terbatas, menurut dia, daerah diminta untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dan menegakkan proses, khususnya pemakaian masker.

Pemda DIY menyatakan siap menaikkan status PPKM menjadi Level 3 di sejumlah daerah. "Kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di Level 3," kata Sekda DIY, Kaddarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (7/2).

Aji menyebut, pihaknya belum menerima instruksi yang jelas dari kementerian terkait dalam penerapan PPKM Level 3. Aji pun belum bisa memastikan seperti apa aturan pembatasan yang akan diberlakukan.

Jika ketentuan di PPKM Level 3 saat ini masih sama dengan sebelumnya, menurut Aji, akan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, baik di tempat wisata, di tempat ibadah maupun di sekolah. "Seperti Level 3 yang dulu ada pembatasan (di tempat wisata), bukan penutupan. Pembatasan 50 persen harus proses ketat."

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti juga mengatakan, pihaknya siap menerapkan ketentuan PPKM Level 3. Untuk menindaklanjuti kenaikan level PPKM ini, pihaknya juga masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat. "Kami

tidak akan berbeda dengan keputusan pemerintah dalam rangka penerapan PPKM," katanya.

Pemerintah Kota Tangerang meminta masyarakat dapat menyikapi secara bijak keputusan pemerintah pusat, yang memberlakukan PPKM Level 3 untuk Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah meyakini, pemerintah pusat memutuskan hal tersebut demi keselamatan bersama. "Masyarakat harus lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan meminimalkan mobilitas yang tidak diperlukan," katanya.

Seiring dengan tingginya angka kasus harian Covid-19 di Kota Tangerang, Arief menyampaikan, pihaknya juga terus melakukan upaya untuk menambah jumlah tempat tidur atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, yang terpapar Covid-19 dan membutuhkan perawatan. Hingga saat ini, sudah ada tiga rumah isolasi terkonstruksi (RIT) yang beroperasi, yakni RIT PKM Jurumudi, RIT PKM Batu Sari, dan RIT Sudimara Pinang dengan total 77 bed.

Pemkot Tangerang juga melakukan pendataan terhadap para warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah. Dari pendataan itu, para warga yang isoman akan diberi bantuan sembako serta memperoleh pelayanan kesehatan dari puskesmas setempat.

■ silyu dian setiawan/eva rianti ed: satria kartika

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 30 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005